

**TINGKAT EKONOMI RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH
USIA MUDA DI NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si) Pada Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**Oleh :
SUSILAWATI
2009/15548**

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

**TINGKAT EKONOMI RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH
USIA MUDA DI NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S.Si) Pada Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :
SUSILAWATI
2009/15548

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul : Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah
Usia Muda Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Susilawati

BP/NIM : 2009/15548

Program Studi : Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Pembimbing II



Drs. Zawirman
NIP. 19610616 198903 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Geografi



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

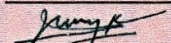
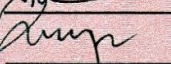
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu, Tanggal 1 Februari 2017 Pukul 13.30 s/d 15.30 WIB

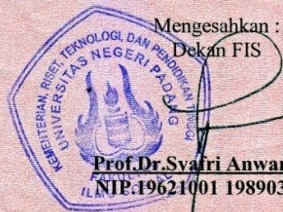
TINGKAT EKONOMI RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH USIA MUDA DI NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Susilawati
BP/NIM : 2009/15548
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2017

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Yurni Suasti, M.Si	
2. Sekretaris	: Drs. Zawirman	
3. Anggota	: Drs. Moh Nasir B	
4. Anggota	: Nofrion, S.Pd., M.Pd	
5. Anggota	: Ratna Wilis, S.Pd., M.p	



Mengesahkan :
Dekan FIS

Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP.19621001 198903 1 002



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilawati
NIM/TM : 15548/2009
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul **"Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan Yang Menikah Usia Muda Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat"**, adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2017

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi


Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Saya yang menyatakan,




Susilawati
NIM. 15548/2009

ABSTRAK

Susilawati (2016): Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat ekonomi rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari tingkat pendapatan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 368 pasang. Sampel wilayah diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu Jorong Sungai Aua 21 sampel, Jorong Sarasah Talang 22 sampel, dan Jorong Sikilang 30. Tiga Jorong tersebut memiliki karakter daerah yang berbeda, Jorong Sikilang merupakan daerah pantai, jorong Sungai Aur merupakan pusat pemerintahan dan jorong Sarasah Talang merupakan jorong perbukitan. Teknik analisis data yang digunakan indeks Gini Ratio.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) tingkat pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aur pada umumnya berpendapatan rendah, bila dibandingkan dengan upah provinsi sumbar yakni Rp 1.650.000/bulan sementara rata-rata pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda adalah Rp 1.321.626 /bulan, dan (2) Tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di ketiga jorong di Nagari Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, yakni Jorong Sungai Aua, Jorong Sarasah Talang, Jorong Sikilang termasuk kategori tinggi baik berdasarkan Gini Ratio maupun Bank Dunia (*World Bank*).

Kata kunci: pasangan menikah usia muda, tingkat pendapatan, ketimpangan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nagari Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama

1. Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku pembimbing I, serta Drs. Zawirman, selaku pembimbing II atas arahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Drs. Moh Nasir B dan Nofrion, SPd, M.Pd, Ratna Wilis, S.Pd, M.P selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan untuk skripsi ini.
3. Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta dorongan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dra.Yurni Suasti, M.Si selaku Ketua Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan Ibu Ahyuni, ST, M.Si selaku sekretaris Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

5. Widya Prarikeslan, M.Si selaku ketua Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta staf dosen dan karyawan Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang beserta Pembantu Dekan dan staf tata usaha yang telah mengeluarkan surat izin penelitian.
7. Kepala UPT Perpustakaan UNP, Perpustakaan FIS, Staf Ruang Baca Jurusan Geografi beserta karyawan yang telah membantu penulis dalam memperlancar dan memberikan kemudahan dalam pencarian referensi untuk skripsi ini.
8. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat yang telah mengeluarkan rekomendasi izin penelitian untuk skripsi ini.
9. Bapak Camat Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yang telah mengeluarkan rekomendasi izin penelitian untuk skripsi ini.
10. Bapak Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yang telah mengeluarkan rekomendasi izin penelitian untuk skripsi ini.
11. Teristimewa bagi kedua orang tua penulis, Ayahanda Jaluak, A.ma.P.d dan Ibunda Justi yang tercinta serta semua keluarga penulis tanpa terkecuali terima kasih atas doa restu, kesabaran, motivasi, dan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan, khususnya teman-teman Geo NK 2009 di Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Padang serta semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Padang, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR PETA.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Teori	6
B. Kajian Penelitian yang Relevan	27
C. Kerangka Konseptual	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel.....	31
C. Variabel	35
D. Indikator Penelitian	35
E. Jenis Data, Sumber, Teknik Pengumpulan Data, dan Alat Pengumpul Data	36
F. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan Hasil Penelitian	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pasangan Menikah Usia Muda dari tahun 2004-2015 di Nagari Sungai Aua.....	3
2. Jumlah Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2010 – 2015.....	15
3. Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Gini Ratio	25
4. Populasi Pasangan Menikah Usia Muda tahun 2004-2015 di Nagari Sungai Aua.....	32
5. Jumlah Pasangan yang Menikah Usia Muda dari Tahun 2004-2015 di Nagari Sungai Aua.....	33
6. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Sumber Data.....	37
7. Penggunaan Lahan di Kecamatan Sungai Aur	41
8. Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Aur Tahun 2016	42
9. Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan Formal di Kecamatan Sungai Aur.....	43
10. Distribusi Lama Menikah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda Jorong Sungai Aua.....	44
11. Distribusi Lama Menikah Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang	45
12. Distribusi Lama Menikah Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang	45
13. Distribusi Mata Pencarian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sungai Aua Tahun 2015	46
14. Distribusi Mata Pencarian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Nagari Sungai Aua Tahun 2015	47
15. Distribusi Mata Pencarian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang	48
16. Distribusi Mata Pencarian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang	49

17.	Distribusi Mata Pencapaian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang.....	50
18.	Distribusi Mata Pencapaian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang.....	51
19.	Distribusi Mata Pencapaian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Nagari Sungai Aua Tahun 2015	53
20.	Distribusi Mata Pencapaian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Nagari Sungai Aua Tahun 2015	54
21.	Pengeluaran Kebutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.....	55
22.	Sebaran Pendapatan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Nagari Sungai Aua	57
23.	Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sungai Aua	58
24.	Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang	59
25.	Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda di jorong Sikilang	60
26.	Tingkat Pendapatan Rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur	62
27.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sungai Aua	63
28.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang.....	64
29.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang	65
30.	Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Masing- masing Jorong di Nagari Sungai Aua.....	66
31.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Menurut Bank Dunia.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Mata Pencaharian Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur	47
2. Mata Pencaharian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Nagari Sungai Aua Tahun 2015	48
3. Mata Pencaharian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda di Jorong Sarasah Talang	49
4. Grafik Sumber Penghasilan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang	50
5. Mata Pencaharian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang	51
6. Mata Pencaharian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang	52
7. Mata Pencaharian Utama Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur	53
8. Mata Pencaharian Sampingan Rumah Tangga Pasangan Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur	54
9. Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sungai Aua	58
10. Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sarasah Talang.....	60
11. Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Jorong Sikilang.....	61
12. Tingkat Pendapatan Rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur	62
13. Kurva <i>Lorenz</i> Ketimpangan Pendapatan Nagari Sungai Aua	69

DAFTAR PETA

Peta	Halaman
1. Peta Lokasi Penelitian	34
2. Peta Administratif Kabupaten Pasaman Barat.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrumen Penelitian.....	78
2. Tabulasi Data	84
3. Klasifikasi Tingkat Pendapatan	99
4. Tingkat Pendapatan Pasangan Menikah Usia Muda Berdasar Jorong.....	101
5. Ketimpangan Pendapatan per jorong	105
6. Ketimpangan Pendapatan Nagari Sungai Aua.....	108
7. Dokumentasi Penelitian.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan YME yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ketergantungan manusia dari satu sama lain disebabkan karena manusia itu mempunyai keterbatasan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi di balik keterbatasan itu mempunyai kelebihan-kelebihan dari manusia yang satunya. Ada hal yang tidak mampu dimiliki oleh salah satu manusia tersebut tetapi manusia lainnya bisa dan mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan jalan melakukan perkawinan.

Kebutuhan hidup manusia itu antara lain kebutuhan biologis terkait dengan wujud manusia sebagai makhluk yang bersifat jasmaniah atau mempunyai raga. Kebutuhan sosial timbul dari konsekuensi logis dari kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat sedangkan kebutuhan psikologis timbul karena manusia merupakan makhluk yang bersifat alamiah.

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Usia yang tepat di dalam perkawinan adalah untuk anak laki-laki 25 tahun dan untuk anak perempuan 20 tahun, sebab pada usia dini baik laki-laki maupun perempuan sudah benar-benar siap dan matang secara fisik maupun non fisik (BKKBN, 2005). Perkawinan dilaksanakan apabila seseorang telah mencapai kematangan fisik maupun non fisik, dengan demikian seseorang yang melaksanakan perkawinan belum mencapai kematangan fisik maupun non fisik (psikologis, ekonomis) dikatakan sebagai perkawinan muda yaitu di bawah umur 19 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki (Junaidi, 2010).

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan usia muda ialah tidak adanya pengertian atau pengetahuan mengenai perkawinan dan akibat buruk dari perkawinan di bawah umur.

Namun kenyataan di lapangan, pasangan usia muda pada umumnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga tidak bisa

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Umumnya pasangan usia muda memiliki pekerjaan non formal, seperti petani dan buruh. Dengan pekerjaan tersebut, pendapatan yang didapatkan jumlahnya tidak menentu dan tergolong kecil. Sebab lain penyebab pasangan usia muda adalah meniru lingkungan sekitarnya, dimana teman sebaya mereka sudah banyak yang menikah, sehingga mereka merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Anggapan di tengah masyarakat bahwa seorang laki-laki yang sudah berusia 20 tahun apabila belum menemukan pasangan maka disebut tidak laku juga membuat angka pasangan menikah muda meningkat.

Di Kecamatan Sungai Aur, fenomena menikah usia muda juga terjadi di setiap jorong. Data tentang pasangan yang menikah usia muda tahun 2004-2015 seperti tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pasangan Menikah Usia Muda dari tahun 2004-2015 di Nagari Sungai Aua

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Muda
1	2004	63 pasang
2	2005	54 pasang
3	2006	52 pasang
4	2007	54 pasang
5	2008	35 pasang
6	2009	54 pasang
7	2010	52 pasang
8	2011	65 pasang
9	2012	65 pasang
10	2013	46 pasang
11	2014	46 pasang
12	2015	48 pasang
Jumlah		638 pasang

Sumber: KUA Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat 2015

Data di atas terlihat jumlah pasangan menikah usia muda di Kecamatan Sungai Aur termasuk besar. Hal ini mengkhawatirkan, karena pasangan usia muda umumnya belum memiliki bekal yang cukup secara ekonomi. Observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Sungai Aur, rata-rata pekerjaan pasangan menikah usia muda adalah petani, terutama petani kelapa sawit dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Pendapatan pasangan menikah usia muda tidak menentu, sementara mereka harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidup.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan keterbatasan waktu, maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Variabel penelitian ini meliputi, tingkat pendapatan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda.
2. Subjek penelitian yang menjadi responden dibatasi pada pasangan menikah usia muda tahun 2004-2015 di Nagari Sungai Aua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana ketimpangan pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
2. Ketimpangan pendapatan rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Studi Program S1 pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNP Padang.
2. Secara akademis, sebagai bahan rujukan dan referensi awal bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian dan kajian lebih lanjut yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Secara praktis, memberikan masukan terhadap pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi menikah usia muda.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat ditinjau dari unsur menurut bahasa perkawinan yaitu bersetubuh atau berkumpul sedangkan menurut seorang ahli Bahasa Indonesia dalam kamusnya menyebutkan pengertian perkawinan samadengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti nikah (Junaidi, 2010).

Kartono (2006) menyatakan perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. Adanya ikatan lahir dan batin dalam perkawinan, berarti bahwa sebuah perkawinan itu perlu adanya kedua ikatan tersebut. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas

agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media masa.

Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk menyalurkan hasrat seksual, keinginan untuk memiliki dan mencapai kehidupan yang tenteran dan bahagia, untuk mencapai kebahagiaan tersebut dibutuhkan kerjasama, saling pengertian, serta adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri (Kertamuda,2009). Menikah merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia yang sangat penting. Pasangan yang telah menjalani masa perkenalan dan merasa cocok satu sama lain biasanya memutuskan untuk menikah agar hubungan mereka sah secara hukum, diakui oleh masing-masing keluarga besar, dan dapat menjadi ikatan yang kuat bagi pasangan dalam membesarkan anak-anak mereka (Ginanjari, 2009). Pernikahan adalah wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Pernikahan merupakan perpaduan emosi antara dua pribadi yang saling berbeda dan berfungsi (Muhyidin 2005).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, dan pasal 7 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Namun Undang-undang tersebut menganut prinsip bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah telah matang jiwa dan raganya. Usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita itu hanya terdapat kematangan fisik tetapi kematangan pendidikan belum tercapai, sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun, usia 16 tahun tahun hanyalah usia yang dimana seorang wanita baru menamatkan SMP, seorang pria usia 19 tahun baru saja menamatkan pendidikan menengah atas, namun pria tersebut belum mampu membiayai lahir bathin. Perkawinan akan rapuh dan tidak berarti apa-apa dalam membina suatu rumah tangga, dipersiapkan baik oleh laki-laki maupun wanita. Persiapan yang dimaksud yaitu persiapan fisik, seperti umur, kematangan, dan membiayai rumah tangga.

b. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga

penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2004).

Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah.

Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun. Menurut BKKBN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang

tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.

2. Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Pasangan yang Menikah Usia Muda

a. Mata Pencaharian

BPS (2008), mata pencaharian adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. Selain itu, kegiatan bekerja ini juga mencakup yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Definisi baku untuk pengangguran adalah kejadian atau keadaan dimana seseorang tidak bukan AK), dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mempersiapkan pekerjaan).

Jenis mata pencaharian utama seseorang dalam macam pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut. Jenis pekerjaan utama biasanya digolongkan: (a) tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, (b) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, (c) tenaga tata usaha dan tenaga sejenis, (d) tenaga usaha penjualan, (e) tenaga usaha jasa, (f) tenaga usaha pertanian, perburuan dan perikanan dan (g) tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar (Mulyadi, 2008).

Status pekerjaan utama seseorang adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Status pekerjaan biasanya terdiri dari: (a) buruh/karyawan adalah pekerja yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang, (b) berusaha sendiri, bila pekerja tersebut bekerja atas resikonya sendiri dan dalam usahanya mempekerjakan orang lain, (c) berusaha dengan dibantu pekerja keluarga atau buruh tidak tetap. Bila pekerja tersebut bekerja atas resikonya sendiri, tetapi dalam usahanya dia mempekerjakan anggota keluarga atau buruh tidak tetap, (d) pekerja keluarga, yaitu pekerja yang tidak mendapat upah baik dalam bentuk uang maupun barang, (e) berusaha dengan buruh tetap, bila pekerja tersebut bekerja atas resiko sendiri dan dalam melaksanakan usahanya dia mempekerjakan buruh tetap (Mulyadi, 2008).

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka mata pencaharian dalam penelitian ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan masing-masing kepala keluarga rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

b. Pekerjaan Sampingan

Pane (2009) pekerjaan sampingan, sambilan, paruh waktu atau tambahan ini adalah pekerjaan yang dilakukan kemudian

sebagai penambah pekerjaan pokok. mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok (Susanto, 1993).

Dalam hal ini jenis usaha yang dimaksudkan adalah jenis usaha sampingan yang dilakukan selain kegiatan pokoknya bertani. Karena pada dasarnya suatu rumah tangga mempunyai dua mata pencaharian, yaitu mata pencarian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah suatu jenis usaha yang dilakukan seseorang secara kontinu dan terus menerus karena keahliannya dan berfungsi sebagai sumber pendapatan. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah jenis usaha yang dilakukan secara tidak tetap dan bisa berubah-ubah yang berfungsi sebagai usaha menambah penghasilan pokok.

Lebih lanjut BPS (2008), menyatakan bahwa:

Cara penentuan suatu kegiatan merupakan pekerjaan utama atau bukan adalah sebagai berikut: (1) jika responden pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama; (2) jika responden pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama.

Berdasarkan definisi di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud jenis usaha sampingan adalah berbagai macam pekerjaan/usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk

mendapatkan nafkah bagi kelangsungan hidupnya selain dari pekerjaan utama.

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan selain mata pencaharian masing-masing kepala keluarga rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

c. Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut Sheraden (2006) adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga termasuk semua barang dan hewan peliharaan dipakai dan membagi pendapatan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan tinggi, sedang dan rendah, dinyatakan bahwa pendapatan seseorang diartikan sebagai jumlah uang atau barang yang diterima sebagai hasil kerja yang dilakukan.

Menurut definisi BPS (2004) pendapatan adalah merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut dapat berupa sewa, upah atau gaji, bunga uang ataupun laba. Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut dengan pendapatan tenaga kerja (*labor income*). Sedangkan pendapatan dari balas jasa selain tenaga kerja disebut dengan

pendapatan bukan tenaga kerja (*non labor-income*). Disamping itu ada pula pendapatan yang bukan berasal dari balas jasa atas pemanfaatan faktor produksi dan tidak bersifat mengikat. Pendapatan ini disebut pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini (*transfer income*) dapat berasal dari pemberian perseorangan atau institusi (misalnya pemerintah). Pendapatan transfer ini dapat positif maupun negatif tergantung pada besarnya pembayaran atau penerimaan transfer dalam jangka waktu tertentu.

Badan Pusat Statistik (2008) pendapatan dirincikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Uang, yaitu:

- a) Dari upah kerja dan gaji yang diterima dari kerja pokok/kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang
- b) Dari yang diproduksi meliputi komisi penjualan.
- c) Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik dan keuntungan sosial.

2) Pendapatan Berupa Barang, yaitu:

- a) Bagian upah dan gaji yang berupa barang pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.
- b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah yang ditempati sendiri.

- c) Penerimaan yang bukan pendapatan yaitu pengambilan tabungan, penjualan barang yang di pakai, penagihan hutang, pinjaman uang, hadiah, dan warisan.

Golongan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat suatu negara dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Mereka yang kaya sekali (golongan sosial ekonomi tinggi)
- 2) Mereka yang berada di tengah (Golongan sosial ekonomi menengah)
- 3) Mereka yang melarat (Golongan sosial ekonomi rendah)

Pendapatan dapat diukur dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR), dalam hal ini dibandingkan dengan UMP Propinsi Sumatera Barat, seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2010 – 2015

Tahun	UMP (Rp.)	Dasar Pelaksanaan
2010	940,000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 560-421-2007 Tanggal 21 Nopember 2009
2011	1,055,000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 562-363-2008 Tanggal 1 Desember 2010
2012	1,150,000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 562-505-2009 Tanggal 31 Desember 2011
2013	1,350,000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 562-340-2010 Tanggal 8 November 2012
2014	1.500.000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 840-479-2011 Tanggal 26 Oktober 2013
2015	1.650.000	Kep.Gubernur Sumbar Nomor : 562-781-2012 Tanggal 6 November 2014

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, 2014

Dapat disimpulkan pendapatan merupakan gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan dimana hasil yang diperoleh mencari jenis usaha kegiatan ekonomi.

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka pendapatan dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan yang diperoleh masing-masing kepala keluarga rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

d. Kebutuhan Hidup Manusia

Dilihat dari tingkat kebutuhan hidup manusia, Maslow (dalam Nurdin, 1990:19) membagi lima tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan dasar filosofis yaitu kebutuhan yang sangat dasar dan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan yang mendorong individu untuk dapat memperoleh ketentraman, perlindungan, kepastian dan keteraturan dalam lingkungannya.
- 3) Kebutuhan akan kasih sayang, merupakan kebutuhan akan kehormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain.

- 4) Kebutuhan mengaktualisasikan diri, merupakan kebutuhan sebagai hasrat individu untuk menjadi orang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya.

Manusia dalam hidup memiliki kebutuhan pokok yang bila tidak dapat terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Sedangkan menurut Mulyanto (1995:57) kebutuhan pokok adalah “kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan konsumsi individu (makanan, pakaian, perumahan) maupun perlindungan sosial tertentu seperti kesehatan, pendidikan.”

3. Ketimpangan Pendapatan

a. Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif (Todaro dan Smith, 2004). Kedua ukuran tersebut adalah:

- 1) *Size distribution of income* (ukuran distribusi pendapatan)

Ukuran Distribusi pendapatan secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Berdasarkan ukuran ini, cara mendapatkan penghasilan tidak dipermasalahkan, apa yang lebih diperhatikan dari ukuran ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa

atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan.

- 2) *Functional or factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi)

Distribusi Pendapatan Fungsional berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan nasional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini.

Dari dua hal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana satu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia.

Konsep tentang ketimpangan/kesenjangan mempunyai kemiripan dengan konsep tentang perbedaan. Seseorang mempunyai tinggi tubuh yang berbeda dengan seseorang yang lain. Fakta menunjukkan adanya perbedaan tinggi tubuh. Pemahaman terhadap perbedaan seperti itu relatif bersifat netral dan tidak terkait dengan moral pemahaman. Berbeda halnya kalau membicarakan perbedaan kekayaan dari kedua orang itu maka umumnya terdapat inklinasi moral tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan kekayaan mempunyai implikasi moral dalam konteks hubungan sosial, misalnya siapa yang harus lebih toleran, bagaimana pembebanan kewajiban sosial pada tiap orang itu dan sebagainya.

Pembahasan kesenjangan menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendefinisian kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut kelompok-kelompok 10% populasi., mulai dari kelompok 10% populasi berpendapatan terendah, kelompok 10% populasi berikutnya dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Cara pengelompokan lain adalah berdasarkan tingkat

pendapatan 40% populasi dengan pendapatan terendah, 40% berikutnya dengan tingkat pendapatan menengah, dan 20% populasi yang berpendapatan tinggi.

b. Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Adelman dan Morris (Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu :

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
- 2) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
- 4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
- 5) Rendahnya mobilitas sosial
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
- 7) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai

akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang

- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, pembagian atau distribusi pendapatan di Indonesia juga menunjukkan terjadinya ketimpangan. Hal tersebut tampak dari makin meningkatnya Indeks Gini Indonesia. Berdasarkan data, Indeks Gini Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Jika pada tahun 2010 besarnya Indeks Gini adalah 0,38, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,41. Menurut Nugroho (2012), ada beberapa sebab mengapa ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia kian parah, yaitu :

- 1) Ketimpangan dalam distribusi asset. Ketimpangan tersebut terlihat sangat parah terutama di sektor pertanian. Berdasarkan data dari sensus pertanian, 57,8 persen petani hanya memiliki lahan rata-rata 0,018 Ha, 38 persen tidak memiliki lahan, dan hanya 4,2 persen yang memiliki lahan 0,5 Ha atau lebih. Lahan yang sempit tentu tidak mencukupi bagi petani untuk memperoleh tingkat pendapatan yang layak. Untuk sektor yang lain, bisa terlihat dengan jelas bagaimana perusahaan atau pengusaha sedang dan besar dengan mudah mendapatkan kredit dengan agunan hanya nama baik, sementara Usaha Menengah, Koperasi, dan Mikro (UMKM) setengah mati untuk mendapatkan kredit.

- 2) Masih besarnya pekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tiadanya jaminan kepastian usaha di masa depan. Tingginya pekerja di sektor informal disebabkan makin padat modalnya teknologi produksi yang digunakan oleh para pengusaha. Hal tersebut terlihat dari makin kecilnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dahulu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 400.000 pekerja baru, kini pertumbuhan ekonomi 1 persen hanya menyerap 200.000 orang tenaga kerja baru. Hal tersebut terlihat jelas misalnya di Industri rokok dimana rata-rata pabrik rokok sekarang hanya mempertahankan para pekerja lama yang rata-rata sudah lanjut usia. Sementara untuk proses produk secara bertahap akan digantikan oleh mesin. Sebab lain lagi adalah justru tumbuhnya sektor-sektor jasa (yang sering disebut *non-tradable*) seperti perdagangan dan jasa keuangan (bank dan lembaga keuangan lain) yang menyerap sedikit tenaga kerja melebihi pertumbuhan sektor produksi seperti manufaktur dan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan masih berlakunya sistem alih daya (*out sourcing*) dalam perekrutan tenaga kerja dimana pengusaha bisa sewaktu-waktu memecat pekerja.
- 3) Akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang memperburuk distribusi pendapatan adalah pemberian subsidi BBM, listrik dan pupuk. Subsidi BBM listrik dan pupuk yang kian besar pada umumnya dinikmati oleh sebagian besar

penduduk golongan menengah ke atas. Ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi tersebut mempertimpang distribusi pendapatan lewat dua jalur. Jalur pertama, memperkuat daya ekonomi (daya usaha dan pendapatan) golongan kaya karena pengeluaran mereka bisa ditekan lewat subsidi yang mereka nikmati. Dan jalur kedua, lewat pengeluaran dalam APBN yang sebenarnya bisa untuk program pengentasan kemiskinan atau program lain yang pro rakyat miskin tetapi salah alokasi untuk subsidi bagi golongan yang seharusnya tidak menerima.

c. Indikator Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Konsep kesenjangan umumnya dinyatakan dalam bentuk indikator kesenjangan. Untuk melihat kesenjangan antar penduduk dalam suatu wilayah, berbagai studi umumnya menggunakan kurva lorenz dan indeks pemerataan distribusi Gini atau Gini Ratio serta kriteria bank dunia, sementara untuk melihat kesenjangan antar wilayah berbagai studi lain menggunakan indeks Williamson.

1) Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ide dasar perhitungan koefisien gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Guna membentuk koefisien Gini, grafik persentase

kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pendapatan digambar pada sumbu vertikal.

Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut Todaro (2003) adalah: lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang, kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.

Ukuran ketimpangan pendapatan yang sering dipakai adalah dengan cara menghitung *Gini Ratio* (GR). Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah komulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

- 1) Nilai GR terletak antara nol dan satu.
- 2) Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- 3) Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.
- 4) Nilai $GR = 0$ atau $GR = 1$ tidak pernah diperoleh dilapangan. Gini Ratio biasanya disertai dengan kurva yang disebut dengan kurva Lorenz.

Tabel 3. Kriteria Ketimpangan Berdasarkan Gini Ratio

Nilai Gini Ratio	Tingkat Ketimpangan
< 0,35	Rendah
0,35 – 0,5	Sedang
>0,5	Tinggi

Sumber : Todaro, 2003

2) Kriteria Bank Dunia

Budiman (1996:4) mengukur ketimpangan pendapatan sejalan dengan ukuran Bank Dunia, yaitu:

- 1) Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima < 12% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan tinggi.
- 2) Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12%-17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan menengah.
- 3) Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima >17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan rendah.

Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Sedangkan formula perhitungan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$YD = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

Dimana :

YD4 = Presentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan ke i-1

P_i = Presentase kumulatif penduduk ke i

q_i = Presentase pendapatan ke i

Selain dari sisi pendapatan, pengukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran. Karena data pengeluaran lebih mudah diperoleh, maka pengukuran ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia ini lebih sering menggunakan data pengeluaran. Namun, pengukuran ketimpangan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran memiliki kelemahan antara lain data yang disajikan akan *under estimate* dibandingkan bila data yang dipergunakan adalah data yang berdasarkan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai tabungan (*saving*). Penyebab lainnya adalah adanya transfer pendapatan. Dalam masyarakat adalah hal yang lumrah bila seseorang memberikan sebagian pendapatannya sebagai sokongan kepada orang tua atau saudara yang tidak mampu. Dengan demikian, tingkat pengeluaran tidak mencerminkan pendapatan yang diperoleh. Masalah lainnya adalah sering tidak tercatatnya pengeluaran-pengeluaran terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- 1) Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
- 2) proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17%

dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah;

- 3) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah (Chenery, dalam Syamsudin, 2011).

Ukuran yang digunakan Bank Dunia sebenarnya tidaklah serumit ukuran-ukuran yang telah dibahas sebelumnya. Pengukuran yang digunakan Bank Dunia tersebut hanya peralatan statistika deskriptif yang sederhana. Dalam statistika deskriptif telah dikenal adanya pengelompokan frekuensi, misalnya dijadikan lima kelompok atau quantile. Secara kumulatif, jika kita mengambil kelompok pertama dari bawah (nilai terendah) quantile, maka diperoleh 20 % penduduk atau penerima pendapatan. Dari 20 % tersebut dihitung jumlah pendapatan mereka dan dibagi dengan pendapatan total, misalnya diperoleh 15 %. Ini berarti 20 % penduduk yang mempunyai pendapatan terendah memperoleh 15 % bagian dari total pendapatan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tingkat ekonomi dan ketimpangan pendapatan Rahayu (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Petani Padi (Studi Kasus: Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan petani padi sawah berdasarkan nilai Gini Ratio sebesar 0,32 berada dalam kategori

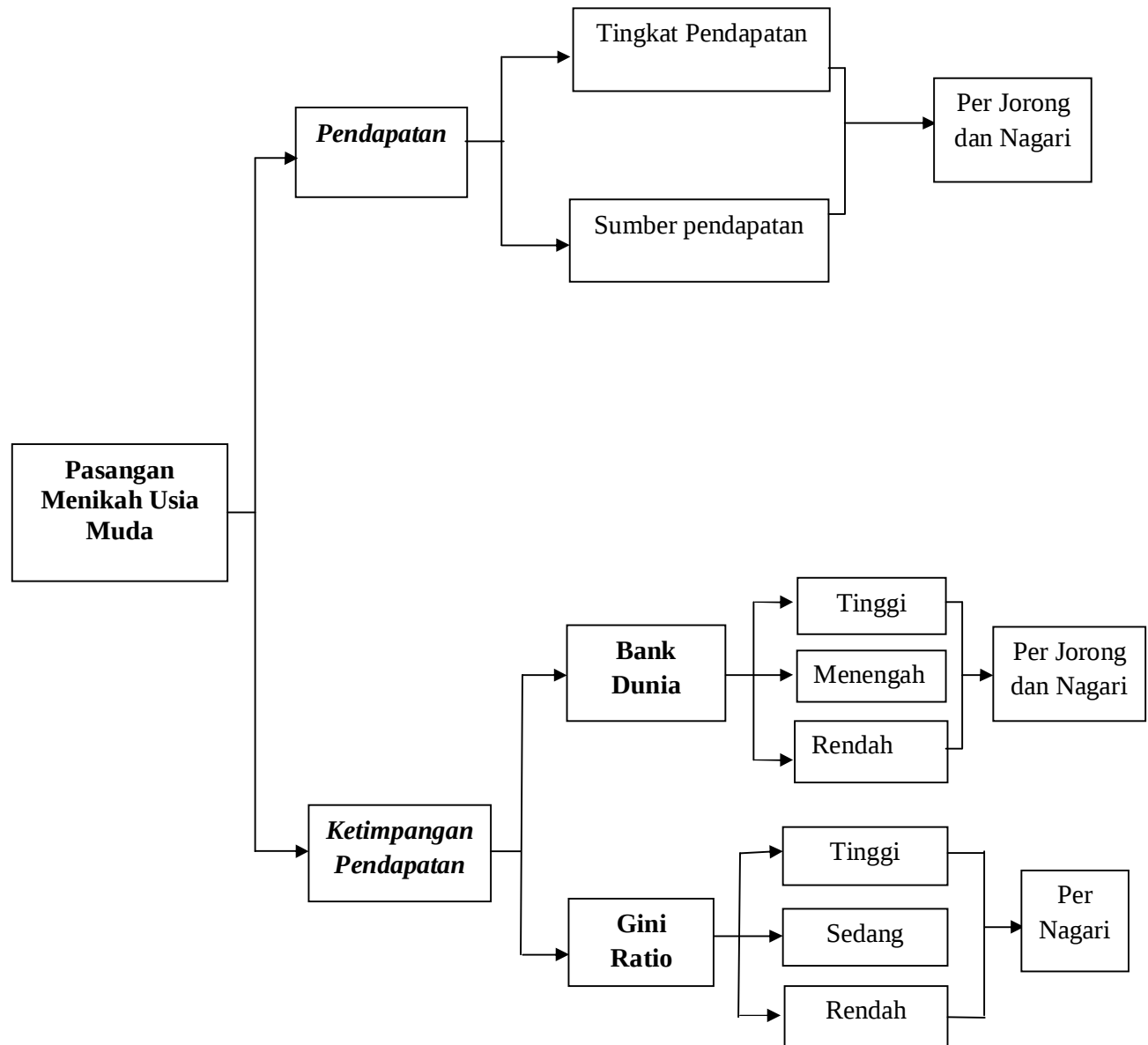
rendah, dan menurut kriteria World Bank juga berada dalam kategori rendah. Sumber pendapatan petani padi sawah diluar usahatani padi sawah cukup beragam dimana pendapatan dari usahatani padi sawah memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan yaitu, sebesar 67,56%. Tingkat kemiskinan menurut kriteria BPS (2011) tidak terdapat petani padi sawah yang berada pada kategori miskin, dan petani padi sawah yang berada pada kategori miskin menurut UMR (2012) sebanyak 37,21%.

Makmur Sari (2011) melakukan penelitian tentang Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa Di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) koefisien Gini (Gini Ratio) dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Peukan Bada adalah ketimpangan sedang untuk pekerjaan penduduk sebagai petani dan buruh dan ketimpangan rendah untuk pekerjaan penduduk sebagai pedagang dan pns. Apabila dilihat secara keseluruhan sampel diperoleh indeks gini sebesar 0,386, ini artinya pada Kabupaten Peukan Bada mempunyai nilai ketimpangan distribusi pendapatannya sedang dan 2) Berdasarkan kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan ketentuan apabila 40% penduduk pendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan maka digolongkan pendapatan tinggi sedang atau kurang merata, kelompok rumah tangga yang berada pada kategori ini adalah petani. Dan kelompok rumah tangga pedagang, PNS dan buruh berada pada kategori sedang, karena menerima lebih dari 12% pendapatan. Lebih lanjut apabila dilihat secara

keseluruhan untuk secara keseluruhan Kecamatan Peukan Bada memperlihatkan bahwa pendapatan masyarakat diwilayah masih kurang merata atau ketimpangan sedang, hal ini menunjukkan bahwa 40% penduduk pendapatan rendah menerima 11,4% pendapatan per tahun, itu artinya ketimpangan di Kecamatan Peukan Bada masih kurang merata atau ketimpangannya sedang.

C. Kerangka Konseptual

Dengan kerangka konseptual akan jelas tampak ada beberapa objek dan konsep yang akan diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah rumah tangga pasangan menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur yang termasuk pendapatan rendah sebanyak 64 rumah tangga (87,67%), sedangkan jumlah yang berada pada tingkat pendapatan tinggi adalah 9 rumah tangga (12,33%). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar rumah tangga pasangan yang menikah usia muda di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur termasuk memiliki pendapatan rendah dengan rata-rata pendapatan rumah tangga menikah usia muda di Nagari Sungai Aur adalah Rp 1.321.626/bulan
2. Ketimpangan pendapatan pasangan menikah usia muda menurut Bank Dunia (*World Bank*) pada Jorong Sungai Aua termasuk kategori tinggi, Jorong Sikilang tinggi dan jorong Sarasah Talang termasuk kategori tinggi. Ketimpangan pendapatan Nagari Sungai Aua menurut indikator Bank Dunia tergolong rendah. Nilai *Gini Ratio* untuk distribusi pendapatan rumah tangga Nagari Sungai Aua pada tahun 2016 adalah sebesar 0,5850 (kategori tinggi), berarti semua pasangan menikah usia muda dengan pendapatan terendah menerima pendapatan tidak sama hingga pasangan menikah usia muda dengan pendapatan yang tertinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Disebabkan karena sebagian besar rumah tangga menikah usia muda di Nagari Sungai Aua bermata pencaharian sebagai petani, disarankan adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian tentang pengelolaan usaha bertani, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang cukup untuk mengembangkan usaha pertanian sehingga dapat menciptakan pemerataan pendapatan.
2. Disebabkan sebagian besar rumah tangga menikah usia muda memiliki keterbatasan dari segi ekonomi, maka disarankan untuk memiliki pekerjaan sampingan supaya dapat menambah pendapatan rumah tangga sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
3. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, pemerintah agar menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan cara meningkatkan akses pada masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1997. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad** Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE – YKPN
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Survei Sosial Ekonomi Nasional SumatraBarat*. Padang
- _____. 2008. *Survey Sosial Ekonomi Nasional*.
- BKKBN, 2005. *Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Halim, dkk.(2010). “*Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Petani Kopi Arabika di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*”.Jurnal.1-14.
- Junaidi, Dedi. 2010. *Bimbingan Perkawinan*. Akademika Prossindox: Jakarta.
- Kartono, K. 2006. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa Jilid 1*.Bandung : Mandar Maju.
- Muhyidin, M. 2005. *Perceraian Yang Indah*. Jogjakarta: Matahati
- Mulyadi. S. 2011. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nanga, Muana. 2004. *Makroekonomi Jakarta*. PT. Ragja Ciapindo. Jakarta.
- Nugroho. 2012. ”Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan & Cara Mengatasinya”. Jurnal Ekonomi dan Sosial, INPUT. Vol 1: hal, 38-48.
- Rosyidi, Suherman. 2003. *Pengantar Teori Ekonomi*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sherraden, Michael. 2006. *Aset Untuk Orang Miskin*. Jakarta: Raja Grafindo

Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan